

KONTESTASI MAKNA DAN DRAMATISME STUDI KOMUNIKASI POLITIK TENTANG REFORMASI DI INDONESIA

Basuki Agus Suparno
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
e-mail : basuki.agus@gmail.com

Abstract

This research is political communication study that focus to the political language involving any interpretation and clash of argument to Reformation in Indonesia. Factually, any social problems can be caused of interpretation to the meaning. The quarrel, misperception, misunderstanding, misleading even conflict as well as war can be cause of interpretation to meaning. This research applied pentad analysis that scrutinize the analytic relation among scene, act, agent, agency and purpose. This analytic explained that many groups have different interests by using Reformation as common groun in getting the ends. The results pointed out that there are five objective situations which form the context of Reformation reflecting the battleground of scene or stage where Reformation contention. First, student demonstration that insisted to Presiden Sohearto to step down. Second, IMF and World Bank want to liberalize the economy platform in Indonesia. Third, riots and massive destruction that happened in many places that make pressure to Soeharto. This pointed out the context of contention between actors who conceive it as civil disobedience and social justice. Fourth, Golkar and its underbouw nominated Soeharto become Presiden for the seventh terms in office. Fifth, military frustedated in facing demonstration and political changes. Five objective of situation formed the conditions that insisted Soeharto step down. This research seriously implied to politics, history and communication itself in the social movement context.

Key words : *contestation, reformation, meaning and dramatism*

Pendahuluan

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, pemaknaan telah menjadi persoalan komunikasi yang sangat penting bagi berbagai segi kehidupan manusia. Kesalahpahaman, percekocokan, pertentangan, perdebatan, kerusuhan, konflik, dan bahkan perang merupakan masalah-masalah yang dapat timbul dari persoalan pemaknaan. Salah satu dari sekian banyak permasalahan tersebut adalah pemaknaan tentang Reformasi.

Reformasi sebagai realitas sejarah tidak bisa berubah. Namun seperti dikatakan Taufik Abdullah (2006:xxxiii)-semua peristiwa sejarah sebagai *historie recite* itu adalah terbuka bagi rekonstruksi yang berkemungkinan berganti

bentuk dan sering merefleksikan keinginan untuk membenarkan atau menyalahkan. O'Rouke (2002) menyebut Reformasi di Indonesia, sebagai periode yang ditandai dengan intrik, tragedi, misteri dan kebingungan.

Ada yang berpendapat bahwa Reformasi tidak identik dengan pergantian individu melainkan Reformasi berkaitan dengan sistem, struktur dan bukan pada orang (*Republika*, 5 Maret 1998); kembali cita-cita Proklamasi (*Republika*, 24 April 1998); amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; b) pencabutan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); c) peradilan khusus terhadap pelaku Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); d) peradilan khusus

terhadap pelaku pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia); e) desentralisasi otonomi daerah seluas-luasnya; f) Reformasi agraria dan; g) Reformasi perburuhan (Rachman, 2000: 104-105)

Dalam konteks ini Reformasi merupakan istilah yang mengacu pada pergolakan sosial, ekonomi, politik dan keamanan di Indonesia yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai 1998-an (Crawford and Hermawan, 2002). Sedangkan *structural reforms* adalah langkah perubahan yang diyakini dapat mengatasi krisis ekonomi, memperbaiki kepercayaan pasar dan penataan kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi (Camdessus, 1999; Sach and Warner, 1995; John Williamson, 1993).

Istilah Reformasi, di dalam tataran filsafati dan ilmiah bersifat problematik. Istilah itu memiliki makna yang berbeda-beda. Reformasi (*reformation*) tidak memiliki pengertian yang sama dengan *reforms* dan istilah itu dalam penerapannya mempunyai konteks yang berbeda. Makna dari istilah (*term*) sering berkaitan dengan asosiasi apa yang muncul terhadap *referent* (Ogden and Richards, 1923).

Kenneth Burke (1945) berpendapat bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat berdiri sendiri. Ia harus dijelaskan di dalam konteks di mana ia berada. Makna kata ditentukan oleh konteks yang menyertainya, yakni dibatasi oleh konteks kata (*verbal context*) dan konteks situasi (*context of situation*). Melalui konteks verbal dan konteks ekstra verbal (*extraverbal context*) kata dapat ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk pernyataan yang memiliki makna yang berbeda-beda.

Dalam konteks Reformasi, manusia menggunakan bahasa untuk mewujudkan motivasi dari pilihan-pilihan yang tersedia, apakah aktor-aktor tersebut sebagai mahasiswa, akademisi, birokrat, teknokrat, militer, ekonom, praktisi hukum, pelaku komunikasi, pengusaha, buruh atau siapa pun. Aktor-aktor politik melakukan teknik-teknik komunikasi dalam berbagai bentuk seperti antitesis, analogi, abstraksi, persuasi, metafora, dan sebagainya. Jadi, berangkat dari istilah Reformasi, banyak pihak melakukan politisasi dalam berkomunikasi.

Fakta itu menjadi sebab, kenapa

Reformasi pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia menimbulkan berbagai pertarungan wacana. Masing-masing berusaha meminggirkan wacana lain, konteks dipertentangkan dengan konteks, pemikiran dipertentangkan dengan pemikiran dan seterusnya dengan melakukan legitimasi dan delegitimasi, menyerang dan menyalahkan, menyakinkan dan mempengaruhi, mempertahankan dan mendorong, yang menggambarkan adanya kekuatan-kekuatan yang membentuk iklim wacana (*the climate opinion*).

Dalam posisi demikian, penelitian ini merupakan studi komunikasi politik tentang bahasa politik yang memperlihatkan *the art of delivery* di dalam *mode of action* yang tercermin di dalam drama politik yang mendeskripsikan tuntutan perubahan kekuasaan di Indonesia pada waktu tahun 1997 sampai 1998. Bahasa politik memiliki kedudukan penting di dalam kajian komunikasi politik (Corcoran, 1990:51).

Corcoran mengatakan bahwa bahasa politik di dalam konteks simbolik yang lebih luas terhadap oposisi, distingsi dan diferensiasi memunculkan narasi terhadap perselisihan, kontestasi dan pertarungan. Lebih jauh dikatakan di manapun ada paksaan (*coersion*), resistensi (*resistance*) dan kekerasan (*violence*), di sana akan ada relevansi intuitif terhadap tatanan politik, apakah luas atau sempit didefinisikan di antara atau ditengah-tengah istilah-istilah yang saling berkontestasi di dalam wacana politik.

Sejak awal, tuntutan Reformasi mempersoalkan praktek kekuasaan yang diterapkan rezim Orde Baru. Di bidang ekonomi, implementasi yang dijalankan dinilai sebagai kapitalisme semu (*ersatz capitalism*) (Kunio, 1986); karakteristik kekuasaan rezim Orde Baru sebagai negara birokratik (*bureaucratic polity*) (Jackson and Pye, 1978); otoritarian korporatis (Robinson, 1993); negara pejabat (Mcvey, 1982); dan neo patrimonialisme (Crouch, 1968). Keterlibatan militer yang dominan dalam pemerintahan, adalah sisi lain yang digugat dalam Reformasi. Ini terkait dengan pemikiran tentang demokrasi itu sendiri yang melihat supremasi sipil terhadap militer adalah aspek kunci demokrasi (Crawford and Hermawan, 2002).

Dengan mencermati alur paparan di atas,

pemaknaan Reformasi yang indikasinya dapat dicermati pada tahun 1997 dan mencapai tahap konsolidasi pada tahun 1998 itu, memicu terjadinya kontestasi makna-makna yang luas. Situasi itu menunjukkan upaya berbagai pihak untuk menyakinkan bahwa gagasan Reformasi perlu dilakukan, yang sebenarnya tidak lain, menuntut pergantian kekuasaan itu sendiri. Dalam kancah itu, melalui bahasa sebagai *the art of delivery*, seseorang bisa mendapat predikat sebagai reformis atau status quo, menyatu sebagai kawan atau menyatu sebagai lawan sekaligus bisa sebagai jalan untuk melakukan pelarian politik atau pun sekedar sebagai katarsis-pelepasan.

Reformasi sebagai istilah dalam tahap perkembangan tertentu telah memunculkan perdebatan yang memicu suatu kontroversi dan drama politik kekuasaan di Indonesia yang mempertanyakan tentang fakta, nilai dan kebijakan (Vancil, 1993:26). Karena tidak satupun dari diri seseorang yang mampu membebaskan sepenuhnya dari masalah yang berkaitan dengan usahanya untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah dalam lingkup yang luas di mana kenyataan tampak tidak pernah lengkap dan pasti.

Sesuatu tidak dapat disebut sebagai drama tanpa menggunakan sejumlah situasi yang ditandai dengan konflik (Burke, 1966:29). Situasi (*scene*) itu diperlukan untuk memperlihatkan adanya panggung drama yang menunjukkan adegan-adegan (*acts*), munculnya masalah-masalah sebagai sumber motivasi yang membentuk plot atau alur (Burke, 1966:29). Plot itu sendiri merupakan bentuk dasar dari setiap babagan suatu drama yang mencerminkan tatanan insiden (*the arrangement of the incidents*) (Fergusson, 1961:14)

Di dalam *scene* itu, tergambar adanya berbagai jenis bahasa yang berbeda yang merupakan bentuk dari tindakan (Fergusson, 1961:7). Dalam arti, beragam pemikiran dan karakter tercermin dari penggunaan bahasa. Aspek bahasa di dalam drama sebagai sesuatu yang penting, karena ia merupakan *the art of delivery*. Karakter-karakter mengungkapkan tindakan-tindakan utama di dalam cara yang berbeda-beda. Corcoran mengatakan: *Language- what we do with language is implicated in action* (Corcoran, 1990:67)

Pada prinsipnya tindakan itu sendiri bersumber pada dua hal, yakni karakter dan pemikiran (*character and thought*). Karakter manusia mendisposisikan tindakan (*act*) di dalam cara-cara tertentu, sekaligus merespon perubahan situasi (*scene*) yang terjadi. Sebagai drama, *scene* yang menggambarkan karakteristik kekuasaan Orde Baru diperlukan guna menjadi dasar dan landasan untuk menjelaskan bahwa sumber-sumber masalah itu timbul dari kondisi objektif dari pelaksanaan kekuasaan di bawah pemerintah Orde Baru. Panggung drama Reformasi dibentuk oleh situasi-situasi di mana pemerintah Orde Baru dinilai sebagai pemerintahan yang otoriter, kekuasaan yang sentralistik pada pribadi Presiden Soeharto, intervensi pemerintah yang terlalu dalam terhadap sistem perekonomian, dan bersifat militerisme.

Namun di sisi lain, pemerintah Orde Baru sendiri mengembangkan analogi-analogi dan metafora-metafora yang digunakan untuk menjaga kekuasaan. Ada analogi-analogi dan metafora yang dilabelkan pada aktor-aktor politik yang menginginkan perubahan seperti pengganggu stabilitas, subversif dan manifestasi dari bahaya laten komunis. Mode-mode pemikiran dibangun di dalam konteks dan kedudukan Orde Baru sebagai orde yang ingin melakukan pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang ingin membawa bangsa Indonesia ke arah modernisasi dan tinggal landas melalui program pembangunan lima tahunan. Dengan demikian, bahasa yang di dalam drama diposisikan sebagai *the art of delivery* memperlihatkan adanya berbagai bentuk antitesis antara situasi yang menempatkan pemerintah Orde Baru sebagai rezim yang buruk dengan situasi yang menggambarkan kondisi yang ideal.

Dengan demikian, kontestasi terjadi pada situasi ketidaksepakatan atau pertentangan muncul. Setiap isu mengandung tiga hal yakni segi potensi, segi kontestasi dan segi akseptasi. Potensi suatu isu mengandung pengertian ada segi-segi yang memicu semua pertanyaan vital oleh mereka yang pro dan mereka yang kontra. Sisi ini memperlihatkan lingkup dan kualitas masalah-masalah yang dipersoalkan.

Sedangkan kontestasi mengandung

pengertian bahwa ada pihak-pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan: *clash of argument*. Di dalam lingkup ini ada pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap sumber-sumber masalah yang memotivasi tindakan-tindakan. Sementara akseptasi mengandung pengertian bahwa ada berbagai pihak atau dua sisi yang menerima sisi-sisi yang disepakati atau disetujui (Vancil, 1993:70)

Kontestasi memperlihatkan masalah-masalah dari berbagai perspektif yang berbeda, saling bersaing. Pertama, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka (Vancil, 1993:82). Kedua, mencakup siapa-siapa yang pro dan dan siapa-siapa yang kontra (*agents*). Ketiga, melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif. Keempat, mencermati tentang karakteristik dan sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan di dalam kontestasi tersebut.

Penelitian ini sendiri ditujukan untuk menganalisis pernyataan-pernyataan verbal sebagai bahasa politik yang memperlihatkan adanya situasi yang saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi dan bagaimana aktor-aktor politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan kepentingan.

Selain hal itu, gerakan Reformasi menimbulkan minat banyak ilmuwan dan ahli dalam melakukan penelitian. Riset yang dilakukan Paulus Sulasdi (2001-UI) melihat konstruksi pemikiran surat kabar Kompas tentang Reformasi dengan mendasarkan pada tajuk rencana selama masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dari bulan Mei 1998 sampai Oktober 1999. Kajian yang dilakukan Faruk, Salam dan Dewi (2001-Lembaga Penelitian UGM) memfokuskan pada bagaimana kata Reformasi menjadi sistem makna yang otoritatif. Amat Darsono dalam tesisnya (2002, Universitas Indonesia) secara khusus memberikan perhatian pada soal berhentinya Presiden Soeharto di tengah gelombang tuntutan Reformasi di sekitar tahun 1998.

Metode Penelitian

Dramatistik sebagai pendekatan dan metode menaruh perhatian pada sumber-sumber, keterbatasan-keterbatasan dan paradok-paradoks terhadap penggunaan simbol tertentu terutama dalam hubungannya dengan motif-motif yang dilakukan manusia dalam tindakan komunikasi (Burke, 1968:445). Dramatistik mencakup metode yang melacak implikasi gagasan dalam tindakan komunikasi manusia sebagai makhluk yang secara khusus dibedakan oleh tindakan itu.

Dramatisme memusatkan perhatian pada hal-hal misalnya, jika ada sebuah tindakan sosial pasti ada individu sebagai aktor yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan dalam konteks atau situasi (*scene*) tertentu. Pada tindakan dalam situasi sosial tertentu terdapat instrumen-instrumen (*agency*) yang digunakan bagi upaya mewujudkan tujuan-tujuan (*purpose*) yang hendak dicapai.

Metode dramatisme mengarahkan bahwa bahasa sebagai hal yang primer karena merupakan ekspresi dari sikap seseorang dan tidak ditempatkan sebagai sekedar instrumen bagi definisi terhadap istilah tertentu. Dramatistik menawarkan sebuah cara untuk menentukan mengapa tiap individu di dalam suatu kejadian atau konteks tertentu menyeleksi strategi komunikasi di dalam memberi pernyataan-pernyataan di dalam mengidentifikasi situasi yang dihadapinya.

Dalam pandangan Burke, tujuan *dramatistic pentad* adalah memberi perhatian pada elemen-elemen itu yang ditujukan untuk menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi simbol yang mereka desain, bekerja di dalam penyertaan motif-motif dari tindakan simbolik tersebut. Hubungan antara elemen ini disebut sebagai *ratio* yang melihat kualitas hubungan antara elemen-elemen yang ada di dramatisme.

Dalam posisi demikian peneliti melakukan prosedur fleksibel yang memungkinkan peneliti bergerak dan berubah dari satu *ratio* ke satu *ratio* yang lain dengan memberi titik tumpu pada konteks kejadian dan tindakan. Di sini peneliti menelusuri pernyataan-pernyataan yang teridentifikasi di kejadian-kejadian sepanjang tahun 1997 sampai 1998 di surat kabar Kompas yang memberi arah pada tuntutan Reformasi. Di dalam

rangkaian itu, peneliti melakukan pencermatan terhadap isu-isu utama yang muncul di dalam pemberitaan dan opini. Apa yang peneliti lakukan adalah mengidentifikasi pernyataan-pernyataan langsung dari berbagai aktor politik di dalam sejumlah kejadian yang melingkupinya dan mengarah pada tuntutan Reformasi.

Dengan demikian, sebagai situasi (*scene*), kontestasi terhadap pernyataan-pernyataan dari aktor politik memperlihatkan kondisi bagaimana isu menjadi forum yang memperlihatkan berbagai perspektif yang berbeda yang saling bersaing. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Reformasi sebagai istilah dalam perkembangan dan periode waktu tertentu telah memunculkan perdebatan yang tumbuh menjadi kontroversi yang melibatkan berbagai aktor politik (*agent*) yang sangat luas, di dalam berbagai *scene* kejadian yang berbeda-beda yang membentuk kondisi objektif yang menjatuhkan dan menghentikan pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, Reformasi ini dapat merupakan *scene* yang mengandung adegan-adegan tindakan sebagai *mode of action* dari para aktor-aktor politik yang terlibat. Sementara hubungan antara tindakan-tindakan (*act*) dengan konteks tertentu, memantapkan tujuan-tujuan dari motif-motif yang menggerakkannya.

Di dalam kontestasi ini ada empat hal penting yang merupakan ciri pokoknya. Pertama, apakah setiap aktor politik (*agent*) menggunakan istilah Reformasi untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka tentang kontroversi tersebut yang berhubungan dengan Reformasi. Kedua, kontestasi dapat dicermati dari pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra. Ketiga, kontestasi makna Reformasi itu sendiri dapat dicermati terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk mendalami dan mempertajam motif-motif dari isu-isu yang menjadi sumber kontroversi. Keempat, kontestasi dapat dicermati dari karakteristik dan

sejarah keyakinan serta kebijakan masa lalu yang sedang berlangsung.

Pro dan kontra yang terjadi terhadap permasalahan ini mencakup cerita-cerita yang luas. Namun secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengerucut pada lima panggung utama di mana pertarungan atau kontestasi makna yang semuanya mengikatkan diri pada kata Reformasi serta berujung pada jatuhnya jabatan Presiden Soeharto.

Kontroversi tentang Kepemimpinan Nasional

Ada kondisi objektif dan monopoli, sehingga pernyataan-pernyataan tentang pencalonan Presiden Soeharto, cenderung mengabaikan munculnya tuntutan agar Presiden Soeharto tidak dicalonkan. Situasi dan kondisi tampak terlalu mempertimbangkan segi formal dan kelembagaan. Di dalam pernyataan-pernyataan tentang kepemimpinan nasional, ada semacam batas-batas tertentu yang dikembangkan pemerintah, yang menegaskan bahwa siapa saja yang mencoba melakukan proses penggantian kepemimpinan nasional secara inskonstitusional akan berhadapan dengan ABRI dan akan digebuk.

Pada sisi lain, cara pikir dan pandangan semacam itu, dihadapkan pada proses-proses erosi dan distorsi dalam pernyataan-pernyataan yang lain terhadap mekanisme politik yang telah dibangun pemerintah Orde Baru selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Cara-cara erosi dan distorsi ini dilakukan oleh individu-individu yang berada di luar pengambilan keputusan atau mereka yang dulu pernah di dalam pemerintahan, yang mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. (*Kompas*, 7 Januari 1997; *Kompas*, 3 September 1997). Sejarah pergantian kepemimpinan nasional dalam pemerintah Orde Baru merupakan sejarah dominan kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pada kenyataannya, perdebatan-perdebatan yang pada awalnya membicarakan tentang mekanisme pencalonan itu membentuk narasi-narasi lain di seputar tema pokok kepemimpinan nasional tersebut seperti yang terlihat pada pernyataan-pernyataan tentang kebulatan tekad.

Pada gilirannya, kontestasi komunikasi tentang persoalan kursi kepresiden untuk masa bakti 1998-2003 telah berkembang sedemikian

rupa, yang tidak saja menunjukkan bagaimana isu-isu yang ada saling bersaing, tetapi juga menunjukkan potensi pemaknaan dari isu-isu itu memberikan kualitas pemahaman tertentu bagai jejak-jejak komunikasi yang pernah terjadi. Siapa-siapa yang pernah memperingatkan, siapa-siapa yang mendorong-dorong, siapa-siapa yang mengambil jarak serta siapa-siapa yang sangat yakin dan mengantarkan Presiden Soeharto untuk duduk kembali sebagai presiden untuk periode 1998-2003. Meski pada akhirnya, terdapat titik balik, ia dijatuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya sendiri.

Gegap gempita tentang pencalonan kepemimpinan nasional itu pada akhirnya memang mengantarkan Presiden Soeharto menjabat kembali untuk masa bakti 1998-2003. Namun, umur jabatan itu tidak lama hanya sekitar 2 bulan. Ia harus merelakan jabatannya dan mundur dari kekuasaan yang telah dipegangnya selama kurang lebih 32 tahun lamanya.

Pemerintah-IMF: Reformasi Struktural Menuju Reformasi Struktural

Presiden Soeharto sendiri yang menyatakan bahwa krisis moneter ini tidak hanya semata-mata kegiatan bisnis (*act*) yang mencari keuntungan (*purpose*) yang ditambah dengan *gambling*. Namun dibalik itu, menurutnya ada tujuan politik (*agency-purpose*) yang lebih besar (*Kompas*, 10 Februari 1998). Ada pihak yang ingin menghancurkan sistem perekonomian Indonesia yang telah secara susah payah dibangun. Tahun 1997-1998 seperti negara Asia lainnya, Indonesia juga mengalami masalah ekonomi, sebagaimana runtuhnya mata uang Baht Thailand pada bulan Juli 1997, Indonesia pada 19 Januari 1998 rupiah tembus pada angka Rp 17.000,00 per dolar AS (Smith, 2003).

Krisis ekonomi adalah istilah yang menjadi sumber, alasan, atau “common ground” sebagai pengabsah untuk mencabut kebijakan-kebijakan perekonomian yang selama itu telah ditempuh pemerintah. Di dalam pengertian *scene*, yakni krisis ekonomi, terdapat tema-tema krusial yang membentuk pengetahuan secara umum tentang perekonomian Indonesia, seperti fundamental ekonomi, defisit transaksi berjalan, hutang terhadap

pihak luar negeri, dan surplus anggaran yang berhubungan dengan neraca anggaran. Semua dapat dipandang sebagai pernyataan-pernyataan *scenic* yang menunjuk pada latar atau dasar bagaimana tindakan-tindakan dilakukan. Mode-mode tindakan dapat dicermati dari berbagai pernyataan mengenai krisis ekonomi secara luas yang tercermin dari kapasitas dan karakteristik pemikiran mereka.

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), telah terjadi *reversal of situation* (Fergusson, 1961) yang melihat krisis ekonomi bukan sebagai akibat dari fundamental ekonomi, melainkan karena ada krisis kepercayaan. Penyetaraan krisis ekonomi dengan krisis kepercayaan pada gilirannya menggerakkan orang untuk lebih mencari sebab-sebab krisis kepercayaan. Tema-tema sentral yang berkembang di seputar krisis kepercayaan ini mencakup antara lain korupsi, monopoli, proteksi, kolusi, subsidi, inefisien, transparansi, akuntabilitas, demoikratisasi ekonomi, Reformasi ekonomi serta Reformasi politik. Semua tema itu diletakkan pada konteks secara personal pada diri Presiden Soeharto, kebijakan dan karakteristik kekuasaan Orde Baru.

Dengan melalui tema-tema itu, satu per satu kebijakan yang telah ditempuh dan berakar, secara tiba-tiba dicabut yang mencerminkan apa yang mereka sebut sebagai Reformasi Struktural tanpa mempertimbangkan dampak yang timbul bagi masyarakat secara keseluruhan. Kerusuhan dan amuk massa yang timbul akibat implementasi kebijakan yang disyaratkan itu, menjadi pintu berikutnya untuk meminta lebih jauh tidak hanya sebatas Reformasi struktural, melainkan Reformasi politik.

Bila dicermati, terdapat berbagai relasi-relasi penting, yang menunjukkan kontestasi di dalam situasi (*scene*) krisis ekonomi ini. Kontestasi secara keseluruhan diperlihatkan antara *scene* dihadapkan dengan *scene*, bagaimana situasi dihadapkan pada situasi yang lain; bagaimana *act* dihadapkan dengan *act*; bagaimana suatu tujuan dihadapkan antara tujuan dan seterusnya. Kematangan suatu gagasan dimatangkan oleh gagasan berikutnya di dalam keterjalinan dari berbagai elemen, apakah mencakup tindakan, situasi, tujuan, fungsi dari tujuan dan sebagainya.

Di dalam relasi-relasi semacam itu, tema-tema korupsi, monopoli, nepotisme, proteksionisme, kroni dihadapkan pada tema-tema tentang liberalisasi perdagangan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan swastanisasi. Akibat kegagalan pemerintah membangun situasi baru dalam menangani krisis, pemerintah menerima kekalahan sehingga berbagai bentuk kebijakan harus ditunda dan bahkan dicabut. Tema-tema ini dibangun berdasarkan narasi-narasi tentang fundamental ekonomi, defisit transaksi berjalan, hutang pemerintah dan jatuh tempo yang mengakibatkan terjadinya volatilitas rupiah, struktur perekonomian yang tidakimbang (konglomerat dan ekonomi kecil).

Akibatnya, paradigma pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan stabilitas politik dan keamanan, yang merupakan lokasi (*scene*), di mana corak dan karakteristik pemerintahan dijalankan, maka dengan paradigma ekonomi yang mengedepankan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, mengubah karakteristik lokasi dan situasi, bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Dengan perkataan lain, situasi ekonomi (*scene of economy*) menentukan tindakan ekonomi (*mode of act*); situasi ekonomi menentukan tindakan politik; situasi ekonomi menentukan situasi politik (*scene of politics*) dan relasi-relasi yang lain ataupun relasi-relasi yang sebaliknya. Tindakan (*act*) ditentukan oleh *scene* sebagai cara pandang bagaimana mereka menempatkan diri dalam kontelasi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi serta ditentukan oleh fungsi dari suatu tujuan.

Aksi dan Demonstrasi Mahasiswa: Gerakan Moral dan Gerakan Politik

Secara simultan, aksi dan demonstrasi mahasiswa dapat diposisikan dalam kegunaan fungsional yang berbeda. Aksi dan demonstrasi dapat dipahami sebagai *scene* yang di dalamnya memperlihatkan bagaimana corak dan karakteristik tindakan dilakukan.

Pernyataan-pernyataan tentang gerakan mahasiswa itu sendiri, dibicarakan dari berbagai sisi yang menunjukkan segi keluasan dari tema-tema yang membangun narasi dari peristiwa aksi dan demonstrasi mahasiswa yang marak dalam

periode tahun 1997 sampai 1998. Agenda aksi dan demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai 1998, merupakan kelanjutan dari aksi-aksi mahasiswa yang muncul pada tahun 1996 yang belum selesai; pandangan yang menyatakan bahwa gerakan ini hanya mencerminkan romantisme perjuangan; depolitisasi kehidupan kampus; sampai pandangan-pandangan yang melihat aksi dan demonstrasi mahasiswa merupakan gerakan politik yang memiliki tujuan-tujuan kekuasaan yang nyata, seperti menuntut dilakukannya perubahan di bidang ekonomi dan politik hingga menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Semua segi itu memberi landasan dan latar (*scene*) bagaimana mode-mode perjuangan dinyatakan ke dalam berbagai pandangan tentang perubahan kekuasaan.

Berbagai pernyataan itu dengan sendirinya, di samping menunjukkan lingkup yang luas terhadap aksi dan demonstrasi mahasiswa itu seperti yang telah disinggung, juga menunjukkan luasnya kalangan yang terlibat dan memberi batasan-batasan terhadap kejadian ini, yang bermuara dua dua tujuan pokok. Pertama, mereka yang menghendaki aksi dan gerakan ini dapat reda bahkan bila mungkin dihentikan, sedangkan kedua mereka yang tetap memberi peluang agar aksi dan demonstrasi ini tetap berlangsung hingga apa yang menjadi tuntutan mereka dipenuhi sampai batas yang sulit untuk ditentukan hingga di mana tuntutan itu harus dikabulkan.

Situasi ini telah menuntun perdebatan-perdebatan yang semakin luas pada suatu pemikiran lain yakni tentang format gerakan mahasiswa. Ada semacam perdebatan yang menunjukkan adanya ambivalensi dalam menempatkan format gerakan mahasiswa ini. Ada yang memandang bahwa gerakan mahasiswa ini merupakan gerakan moral (*moral forces*) yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan kekuatan di luar kampus. Di sisi lain, ada yang menyatakan bahwa format gerakan mahasiswa merupakan bentuk embrio dari *people power* yang merangkul rakyat dan membentuk opini yang lebih luas di masyarakat.

Namun, ada pula yang menyatakan secara tegas bahwa gerakan mahasiswa adalah sebuah gerakan politik yang ditentukan sepenuhnya oleh

aksi massa. Di dalam pola ini terdapat relasi antara kondisi objektif dan kondisi subjektif. gerakan dan aksi mahasiswa angkatan 1998 secara faktual mengalami keterbatasan apa yang ia sebut sebagai kekuatan subjektif yang mencakup gagasan, organisasi, kepemimpinan dan basis massa. Kedua, aksi dan demonstrasi mahasiswa angkatan 1998 diuntungkan oleh kondisi objektif dengan terjadinya krisis ekonomi.

Kerusuhan Massa: Kekerasan Pemerintah dan Hasutan Aktor Intelektual

Kejadian-kejadian kerusuhan massa tidak dapat dilepaskan dari kejadian-kejadian lain seperti aksi dan demonstrasi mahasiswa, krisis ekonomi, dan kepemimpinan nasional yang mengkonstruksi tema-tema komunikasi yang membentuk sebuah drama perubahan serta tuntutan tentang Reformasi. Tidak semua orang berpikir dan bertindak dalam cara yang sama. Dalam perspektif ini, di dalam peristiwa itu orang-orang akan memilih diantara cerita-cerita yang saling berkompetisi yang menjelaskan sebuah kejadian tertentu. Cerita-cerita itu yang akan menyusun dan menyajikan sebuah pandangan terhadap realitas dunia yang merupakan seleksi, refleksi atau defleksi melalui deskripsi sebuah situasi tertentu yang mencakup karakter, tindakan dan konteks yang mengelilinginya (Foss, 1996:400)

Secara umum, perdebatan ini terjadi pada persoalan: Apa yang menjadi sebab-sebab kerusuhan massa dan siapa yang menjadi pelaku kerusuhan massa tersebut. Sekalipun hanya ada dua hal umum yang menjadi sentral perdebatan tentang kenapa terjadi kerusuhan-kerusuhan massa dan siapa-siapa yang melakukannya namun di dalam pokok-pokok permasalahan itu, menimbulkan keluasaan isu yang beragam.

Hal yang menarik adalah ada aktor-aktor politik yang melihat kerusuhan-kerusuhan massa, sebagai produk atau ekses kekerasan negara yang telah berlangsung lama sebagai kekerasan struktural. Apa yang penting dari pernyataan semacam ini adalah adanya tujuan yang tersirat secara suasis bahwa sumber kesalahan dan kekerasan yang terjadi sebagaimana yang tercermin dalam radikalisme massa, adalah

pemerintah itu sendiri. Kekerasan yang termanifestasikan dalam kerusuhan dinyatakan sebagai pantulan langsung dari cara pemerintah telah melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap warga negaranya yang menyaksikan berbagai penyelewengan birokrasi pemerintah terhadap kebijakan pembangunan yang tidak adil (*Kompas*, 20 Januari 1997).

Dalam pandangan yang demikian, pernyataan-pernyataan ini dikuatkan dengan pandangan-pandangan mengenai kesenjangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat; penyalahgunaan wewenang dan jabatan; arogansi kekuasaan dan kekayaan; serta soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Kerusuhan dengan demikian diabsahkan oleh pandangan mereka, yang melihatnya sebagai korban dari pembangunan (*Kompas*, 19 Desember 1997). Kerusuhan-kerusuhan massa yang disertai dengan penjarahan, pembakaran, pengrusakan serta sering menimbulkan korban luka-luka dan kematian itu juga dinyatakan sebagai penghancuran terhadap simbol-simbol kekuatan ekonomi serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pemerintah. Ini merupakan bentuk pembangunan sipil.

Dalam nusa yang lebih mendasar ada yang melihat bahwa potret gerakan perubahan sosial dalam periode tahun 1990-an, ditentukan oleh tiga kekuatan pengubah. Pertama, adalah industrialisasi yang terlihat dalam proses dan kegiatan pembangunan yang mengubah desa menjadi desa ekonomi yang memperlonggar ikatan-ikatan sosial serta tidak lagi berbasis pada ekonomi agraris sehingga menjadi proletariat tulen. Kedua, urbanisasi yang menularkan gaya hidup kota ke desa, sedangkan ketiga internasionalisasi yakni terjadinya tingkat perubahan sosial dunia yang telah menciptakan *new political resources* yang dapat digunakan untuk tujuan reformis dan perubahan.

Pembicaraan-pembicaraan lain sebagai penyebab kerusuhan-kerusuhan tersebut tampak dari pernyataan yang melihatnya sebagai akibat adanya keretakan struktural dan fragmentasi elit politik. Karena keretakan dan fragmentasi elit politik ini, timbul bias permainan politik yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan terjadi akibat

sejumlah elit politik telah melakukan kooptasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai kepentingan politiknya yang kemudian memanfaatkan isu SARA, kesenjangan sosial, ketidakadilan, kolusi, korupsi, nepotisme dan sebagainya. Dalam lingkup isu ini, pemerintah sering menyatakan bahwa di balik kerusuhan massa yang terjadi, ada aktor-aktor intelektual yang menghasut dan antipemerintah. Mereka adalah sekelompok kecil kaum terpelajar atau kaum menengah yang berkecukupan yang selalu menghembuskan situasi pesimis (*Kompas*, 3 Juni 1997). Dengan gambaran tersebut, betapa terlihat bagai konteks situasi tertentu dihadapkan pada konteks situasi yang lain, kualitas tindakan dihadapkan pada kualitas tindakan yang lain, tujuan satu dihadapkan dengan tujuan yang lain, fungsi dari tujuan dihadapkan dengan fungsi dari tujuan yang lain.

Apa yang telah dipaparkan setidaknya telah menunjukkan beragam pernyataan yang memperlihatkan isu-isu penting yang mencakup persoalan sebab-sebab terjadinya kerusuhan massa. Ada pertentangan yang sekaligus menunjukkan persaingan dari satu pernyataan ke pernyataan yang lain, yang satu sisi melihat sumber penyebab itu terletak pada pemerintah, sedangkan di sisi lain, melihatnya adanya permainan elit politik atau aktor-aktor intelektual yang antipemerintah.

Terlihat bahwa kerusuhan massa sebagai *scene* ditentukan gagasan-gagasan mengenai sebab-sebab kerusuhan yang tercermin dari pernyataan-pernyataan tentang kekerasan negara, keretakan struktural dan fragmentasi politik, serta akibat dari proses pembangunan dan modernisasi yang tidak dapat dilepaskan dari proses-proses industrialisasi, urbanisasi dan internasionalisasi. Proses modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan pada satu sisi, sedangkan di sisi lain terjadi marginalisasi. Sementara di ranah politik tengah terjadi fragmentasi dan keretakan struktural yang mengakibatkan elit-elit politik melakukan kooptasi dan permainan politik. Hubungan antara situasi yang berbeda, meletupkan berbagai bentuk kerusuhan

ABRI dalam Ujian Loyalitas

Sikap ABRI yang tercermin dari tindakan

dan pernyataan-pernyataan para petinggi itu, semakin dilematis, ketika gerakan dan tuntutan telah menjadi begitu massif yang datang dari beberapa arah yakni berbagai kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, purnawirawan, ABRI dan ulama (Wiranto, 2003: 79). Kondisi ini tidak mungkin, ABRI akan mengambil tindakan represif yang akan menimbulkan jatuh korban. Meskipun pengingkaran terhadap pemerintah telah diperlihatkan begitu nyata, namun sampai sejauh itu ABRI mampu menahan diri serta tidak melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi dan demonstrasi. Seperti yang dikatakan Harold Crouch (2003), meskipun mahasiswa waktu itu mengatakan “Soeharto harus turun, “Gantung Soeharto” dan macam-macam kalimat keras lain, Jenderal Wiranto yang kala itu menjadi Menhankam/Pangab menjelang Presiden Soeharto mengundurkan diri, masih mentolerir dengan mengatakan mahasiswa bisa berdemonstrasi asal tidak di luar kampus.

Dengan gambaran itu, ABRI telah mengambil upaya-upayanya untuk melakukan kendali terhadap situasi dan wacana yang berkembang. Bahkan ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti pun kembali Jenderal Wiranto mengatakan bahwa sebagai sikap menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, ABRI akan tetap menjaga kehormatan dan keselamatan para mantan presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat termasuk Bapak Soeharto beserta keluarga.

Di dalam arus besar perubahan yang terjadi, ABRI telah menunjukkan loyalitasnya terhadap pemerintahan dan konstitusi, meski sebagai institusi, keberadaannya, juga berada di dalam tuntutan perubahan itu sendiri terhadap peran-perannya pada masa lalu yang sering dinilai sebagai represif dan arogan. Oleh karena itu, berbagai pernyataan menyertakan tuntutan Reformasi internal dalam tubuh ABRI yang antara lain menyangkut peran sosial politik dan jatah kursi di lembaga legislatif.

Tekanan berat yang lain datang dari krisis ekonomi dan volatilitas nilai rupiah yang memporakporandakan fundamental ekonomi Indonesia yang banyak orang menilai bersumber dari krisis kepercayaan. Satu per satu landasan-

landasan ekonomi yang diproyeksikan sebagai cikal bakal sebagai struktur ekonomi yang kuat dan tangguh harus dicabut untuk mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan IMF. Struktur ekonomi ini dibongkar secara tiba-tiba yang membawa akibat langsung pada segi kehidupan masyarakat luas. Bahan-bahan kebutuhan menjadi melonjak, perusahaan-perusahaan ditutup, dan pengangguran meningkat yang membawa ketegangan masyarakat menjadi mudah dipicu untuk melakukan bentuk-bentuk kerusuhan massa yang disertai penjarahan, pembakaran dan pengrusakan. Situasi ini ditambah gerakan dan aksi mahasiswa yang bersifat massal yang bergerak pada lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerusuhan-kerusuhan serta bentrok dengan aparat keamanan.

Pada titik kulminasi Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 mengumumkan pengunduran dirinya. Pada tanggal itulah Presiden Soeharto menyatakan: “ Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis 21 Mei 1998.” (*Kompas*, 22 Mei 1998, *Media Indonesia*, 22 Mei 1998, *Habibie*, 2006; *Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 1998)

Di dalam pidato pengunduran diri itu, ada segi-segi penting yang dapat dicermati. Pertama, ada keinginan Presiden Soeharto untuk melaksanakan Reformasi secara tertib, damai dan konstitusional yang diawali dengan pembentukan Kabinet Reformasi. Kedua, tidak ada tanggapan yang memadai, maka Kabinet Reformasi itu tidak dapat terbentuk sehingga perubahan di dalam Kabinet Pembangunan VII tidak diperlukan lagi. Ketiga, dengan kenyataan itu, tugas pemerintah negara dan pembangunan menjadi sulit untuk dijalankan. Keempat, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Kelima, menyerahkan jabatan Presiden ini kepada wakil presiden untuk dilanjutkan.

Viktimisasi sendiri merupakan bentuk dan upaya individu untuk melakukan penebusan kesalahan atau dosa (*redemption*) yang umumnya mengambil dua bentuk, yakni pertama *mortification*- mengembalikan terjadinya *guilt* pada diri sendiri dan kedua adalah *scapegoat* yakni mencari

faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah dan bertanggungjawab.

Dalam drama politik yang terjadi, Presiden Soeharto adalah aktor utama yang ditempatkan dan diposisikan sebagai sebagai akar dari permasalahan sehingga ia disalahkan, dihujat dan didiskreditkan. Persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme sering dihubungkan secara pribadi terhadap kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, yang mengarah pada keluarga Cendana, termasuk aset kekayaan, perusahaan dan yayasan-yayasan yang dikelolanya. Presiden Soeharto dicitrakan sebagai sosok pemimpin yang otoriter, menerapkan kebijakan yang represif, menghalang-halangi kebebasan berpendapat dan keras.

Disamping persoalan pribadi yang tertuju pada pribadi Presiden Soeharto yang merupakan sasaran dari Reformasi, viktimisasi terhadap kebijakan juga terjadi. Di bidang ekonomi misalnya, kegiatan ini dinilai terlalu diwarnai tingginya intervensi pemerintah, adanya praktek proteksionisme, monopoli, korupsi, nepotisme dan kolusi. Perekonomian Indonesia disebut sebagai perekonomian yang semu. Struktur ekonomi ini juga disebut sebagai struktur perekonomian yang timpang karena dikuasai oleh segelintir orang yang disebut sebagai konglomerat.

Simpulan

Sebagai studi komunikasi politik yang meneliti kontestasi makna Reformasi yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai tahun 1998, yang didasarkan pada jejak-jejak pesan yang terekam di dalam surat kabar Kompas yang didukung oleh berbagai dokumen, sejumlah wawancara dan bahan-bahan publikasi, terdapat beberapa kesimpulan penting.

Pertama, Reformasi mempunyai makna transformatif yang mencakup tema-tema yang luas, menampilkan pernyataan-pernyataan beragam seperti argumen, antitesa, perbandingan, metafora hingga ke dalam bentuk pertentangan dan kontroversi. Interpretasi terhadap tuntutan Reformasi di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebatas upaya untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan menguatnya tuntutan itu lebih ditentukan oleh kebersinergian kejadian-kejadian sebagai *scene* yang dimatangkan atau mema-

tindakan-tindakan dari berbagai kalangan yang menyertakan motif-motif komunikasi yang memberi tekanan terhadap rezim Orde Baru.

Pada sisi lain, kondisi-kondisi objektif yang mencerminkan adanya keinginan untuk berubah digunakan untuk mendistorsi konteks-konteks yang dibangun rezim Orde Baru sebagai dasar dan sumber legitimasinya. Karena itu, kontestasi makna terhadap Reformasi tergambar di dalam kontestasi terhadap konteks-konteks yang ada dan berkembang yang saling bertarung dari berbagai aktor-aktor politik yang terlibat. Dalam dramatisme, konteks atau *scene* merupakan lingkup di mana babagan suatu adegan diperlihatkan serta hubungan antara konteks satu dengan konteks yang lain di mana hal itu mencerminkan adanya struktur plot drama.

Kedua, sebagai tuntutan, keberhasilan Reformasi lebih dikarenakan telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai “*a device that unifies all those who share the same enemy*,” yakni tuntutan Reformasi disatukan oleh satu tujuan yang sama dengan menempatkan Presiden Soeharto sebagai sasaran dan target dari gerakan Reformasi. Dalam hal ini ada dua pola yang dikembangkan, yakni melakukan pengkambinghitaman secara personal dan kelembagaan politik serta kebijakan politik dalam rezim Orde Baru.

Ketiga, terdapat paradoks-paradoks yang tidak dapat dihindari yang muncul dari persoalan penilaian subjektif personal dalam kaitannya dengan fakta yang terjadi serta kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Karena faktor ini, banyak aktor-aktor politik terlihat tidak konsisten dan konsekuen serta bersikap tidak adil terhadap apa yang mereka nyatakan tentang pemerintah Orde Baru dan Presiden Soeharto. Akibatnya cara bagaimana menjalankan konsolidasi kekuasaan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri telah menimbulkan perpecahan di kalangan mereka yang mendefinisikan diri sebagai kaum Reformis.

Keempat, secara umum penelitian ini melihat kontestasi makna Reformasi dalam dramatisme politik menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah kekuatan penentu yang menentukan pencitraan tertentu terhadap praktek-praktek pemerintah Orde Baru sekaligus memfasilitasi bentuk-bentuk koreksi, evaluasi,

kritik dan pendistorsian terhadap sumber-sumber legitimasi pemerintah Orde Baru.

Daftar Pustaka

- Aprinus Salam, Shinta Ari Dewi dan Faruk, 2001, *Wacana Reformasi di Media Massa*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UGM.
- Amat Darsono, 2002, *Berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI di Tengah Gelombang Tuntutan Reformasi*, Jakarta: Tesis-Universitas Indonesia.
- Burke, Kenneth, 1945, *A Grammar of Motives*, New York: Prentice Hall.
- , “Dramatism” in D. L Sills (ed), 1968, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol 7, New York: Macmillan
- , 1972, *Dramatism and Development*, MA: Clark University Press.
- Corcoran, Paul E, “Language and Politics” in David L Swanson and Dan Nimmo, 1990, *New Direction in Political Communication A Resource Book*, California: Sage Publication.
- Crouch, Harold, 1978, *The Army and Politics in Indonesia*, New York: Cornel University Press.
- Fergusson, Francis, 1961, *Aristotle’s Poetics with An Introductory Essay*, Massachusetts: The Colonial Press.
- Idi Subandy Ibrahim, (ed), 2003, *Wiranto di Tengah Badai*, Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.
- Jackson, Karl D ., and Lucian W Pye, 1978, *Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley: California University Press.
- Kunio, Yoshihara, (terj), 1990, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- M. Fadjroel Rachman, “Peran Politik, Territorial dan Bisnis TNI/POLRI, dalam Dedy N.Hidayat, dkk., 2000, *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mc Vey, Ruth, (terj), 1998, *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- O’Donnell, Guillermo and Schmitler, Phillippe C,

- 1986, *Transitions from Authoritarian Rule*, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Ogden, C.K., and I.A. Richards, 1923, *The Meaning of Meaning The Study of The Influence of Language Upon Thought and of The Science of Symbolism*, New York: A Harvest Book.
- O'Rourke, Kevin, 2002, *Reformasi The Struggle for Power in Post-Soeharto*, NSW: Allen and Unwin, Ltd.
- Paulus Sulasdi, 2001, *Konstruksi Pemikiran Kompas tentang Reformasi Berdasarkan Tajuk Rencana Selama Pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie*, Jakarta: Tesis-Universitas Indonesia.
- Robinson, Richard, 1986, *Indonesia The Rise of Capital*, Sydney: Allen and Unwin Ltd.
- , "Indonesia: Tension in State and Regime, in Kevin Hewison, Richard Robinson and Garry Rodan, (ed), 1993, *Authoritarian, Democracy and Capitalism*, New South Wales: Allen and Unwin, Ltd.
- Sulastomo, 2003, *Reformasi antara Harapan dan Realita*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Taufik Abdullah, "Pengantar" dalam Idi Subandy Ibrahim, (ed), 2003, *Wiranto di Tengah Badai*, Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.
- Thompson, John B., (terj), 2005, *Filsafat Bahasa dan Hermeneutika*, Surabaya: Penerbit Visi Humanika.
- Turner, Jonathan H., 1998, *The Structure of Sociological Theory*, Belmont CA Wadworth Publishing Company.
- Vancil, David L., 1993, *Rhetoric and Argumentation*, Boston: Allyn and Bacon.

Jurnal-Jurnal

- Crawford, Gordon and Yulius P. Hermawan, 2002, International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia, Contemporary Southeast Asia, Volume 24, Issue 2.
- Smith, Benjamin, 2003, *If I Do These Things, They Will Throw me Out: Economy Reform and The Collapse of Indonesia 's New Order*, Journal of International Affairs, Vol.57, Issue: 1.

Paper

- Camdessus, Michel, *Economic and Financial Situation in Asia: Latest Development*, Paper- Aisa-Europe Finance Minister Meeting, Frankfurt, January, 16, 1999.
- Sach, Jeffrey D., and Andrew M Warner, *Economic Convergence and Economic Policies*, NBER Working Paper, February, 1993.
- William, John, *Democracy and The Washington Consensus*, Paper, World Development, 1993, Vol.21.

Surat Kabar

- Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 1998
- Kompas*, 7 Januari 1997
- Kompas*, 3 September 1997
- Kompas*, 20 Januari 1997
- Kompas*, 19 Desember 1997
- Kompas*, 3 Juni 1997
- Kompas*, 22 Mei 1998,
- Media Indonesia*, 22 Mei 1998,
- Republika*, 5 Maret 1998
- Republika*, 24 Ap

